



Prediksi Realisasi Tahun Ini Rendah

Penyerapan APBD DKI 2014 hanya Mencapai 48 Persen

RENDAHNYA penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 lalu, diprediksi akan kembali terulang pada tahun ini. Pada tahun lalu, serapan anggaran hanya berkisar 48 persen, dari total APBD 72 triliun. Penyerapan itu paling kecil dalam sejarah realisasi APBD DKI dari tahun 2004 silam. Pada tahun ini, angka itu diyakini tidak akan berbeda jauh ■

Itu terungkap pada acara diskusi publik yang digelar Yayasan Renaissance Foundation di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kemarin (15/1). "Tingkat penyerapan APBD 2015 tidak akan jauh beda dari tahun lalu yang cuma 48 persen dari total Rp 72 triliun," ujar Ridwan Saidi, Ketua Renaissance.

Pria yang dikenal sebagai budayawan Betawi itu juga menjelaskan, salah satu indikasinya APBD DKI Jakarta 2015 hingga kini belum juga ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan DPRD Jakarta. Hal ini diyakini bakal berdampak pada rendahnya penyerapan kegiatan seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Selain itu, jika berkaca pada masa-masa sebelumnya, yakni sejak zaman mantan Gubernur Fauzi Bowo, beralih ke mantan Gubernur Joko Widodo lalu ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tingkat serapan APBD DKI tidak pernah 100 persen. Tapi selalu berada di sekitar 48 persen.

"Mungkin uangnya memang segitugitunya. Cuma perhitungannya saja yang salah," ujar Ridwan didampingi aktivis yayasan seperti Amir Hamzah, Didik Purnomo, Dela, dan lainnya. Apalagi, menurutnya juga, tahun ini Gubernur Ahok masih akan bermain-main dengan bongkar-pasang jabatan sehingga membuat para pegawai gerah dan tak maksimal bekerja.

"Contohnya baru dua pekan lalu, Ahok merombak ribuan jabatan. Mereka akan dievaluasi selama tiga bulan. Selama itu pula, para pegawai tak fokus bekerja karena selalu di bawah tekanan," tandasnya. Dampak bongkar pasang pejabat ini akan berpengaruh terhadap penyerapan

pan anggaran DKI 2015.

Sedangkan Pengamat perkotaan Amir Hamzah, yang menjadi pembicara dalam diskusi itu juga berpendapat kesalahan fatal Pemprov DKI tahun lalu adalah melambungkan pajak bumi dan bangunan (PBB) sehingga mencekik leher rakyat Jakarta.

"Saking mahalnyanya pajak, mulai terjadi pembangkangan publik. Sebagian rakyat ramai-ramai tidak bayar PBB sehingga pendapatan asli daerah (PAD) sektor pajak sangat rendah," terangnya. Amir menambahkan, masyarakat tak bayar PBB selain mahal, juga tidak ada sanksi yang berarti.

"Nyaris tidak ada sanksi bagi penunggak pajak. Paling di depan rumah cuma dipasang pengumuman menunggak pajak. Tidak ada sanksi pidana yang membuat masyarakat Ibu Kota mau membayar pajak yang naik berlipat-lipat itu," jelasnya juga.

Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, tidak menambah Rancangan APBD DKI Jakarta 2015 secara signifikan. Sebab, peningkatan hanya terjadi sebesar 0,24 persen dari 2014. Tidak signifikannya penambahan anggaran pada 2015 karena terjadi pemangkasan pengeluaran.

Salah satunya adalah honorarium atau uang honor untuk pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta. "Lebih dikit aja. Kami mulai putuskan tidak ada lagi honorarium. Karena itu juga duitnya besar. Kalau mau gaji, ya gajian. Nggak usah pakai kegiatan-kegiatan yang ada honor-honor lagi," untkannya.

Berdasarkan APBD DKI Jakarta 2014, anggaran honorarium mencapai Rp 2,3 triliun. Karena angka ini terlalu besar, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk tidak memasukkannya dalam RAPBD DKI Jakarta 2015.

Selain itu, Ahok juga akan menghentikan penggunaan sistem kerja *outsourcing* di seluruh unit kerja.

Sebab dinilai merugikan untuk tenaga kerja dan Pemprov DKI Jakarta. Kegiatan-kegiatan yang penting akan dikerjakan sendiri oleh SKPD. "Kami juga tidak mau lagi pekerjaan rutin diwastakan. Yang penting-penting kami ambil alih sendiri. Itu perubahan yang signifikan," jelas juga mantan Bupati Belitung Timur ini.

Diungkapkannya lagi, perubahan akan



dilakukan pada pengelolaan di kelurahan dan kecamatan. Sebab anggaran dana untuk perbaikan infrastruktur akan digelontorkan tanpa masuk Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) DKI Jakarta.

"Kami ingin lurah camat ini sebagai manager. Uangnya pun gelondongan. Jadi kalau perbaiki jalan atau beli tanah tidak ditentukan titiknya. Ditaruh aja. Supaya kalau ada (yang mau dibebaskan atau diperbaiki) cepat beli, cepat bayar. Kami yakin tahun ini akan jauh lebih cepat penyerapannya," tandasnya. (wok)

